

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diungkap pada bab sebelumnya menyangkut kajian tentang model pembelajaran *value clarification technique of law* (VCTL) pada pembelajaran Pendidikan Pancasila, maka diperoleh kesimpulan umum bahwa pengembangan model *value clarification technique of law* melalui pembelajaran pendidikan Pancasila mampu memperkuat hak dan tanggung jawab digital siswa SMA Negeri di Kota Padang. Adapun simpulan khusus dari permasalahan yang dikaji adalah:

1. Gambaran penggunaan teknologi internet oleh siswa di kota Padang adalah bahwa mayoritas siswa merasa ragu-ragu dalam menggunakan hak digitalnya hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi penggunaan internet secara bijak. Di sisi lain siswa sudah menyadari dengan baik tanggung jawab digitalnya dalam menghormati dan menjaga hak orang lain.
2. Model pembelajaran *value clarification technique of law* (VCTL) sebagai salah satu alternative model pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Menengah Atas. Model VCTL merupakan penyempurnaan dari model *value clarification technique* (VCT) dengan menambahkan konsep “*Law*” (hukum). Konsep hukum ini diperlukan untuk memberikan rambu-rambu normatif yang bersifat objektif. Konsep hukum dalam model VCTL hadir sebagai penguatan pada tahap akhir (sintaks) pembelajaran klarifikasi nilai. Konsep ini tidak hanya menjadi acuan etik, melainkan juga sebagai pembatas, pengarah, dan penguat nilai-nilai yang diklarifikasi, sehingga pembelajaran nilai tidak berhenti pada ranah subjektif dan afektif belaka, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan hukum positif. Siswa menjadi sadar bahwa tidak semua pilihan nilai dibenarkan secara sosial dan hukum. Nilai-nilai yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi atau konsekuensi dan terjadi transisi nilai dari yang semula hanya berdasarkan kesadaran moral pribadi, menjadi nilai yang berbasis *legal awareness* dan *civic responsibility*.

3. Uji validitas buku model VCTL menunjukkan nilai moment kappa sebesar 0,88 yang berarti adanya tingkat kesepakatan yang sangat tinggi diantara para ahli yang menilai model pembelajaran tersebut ini layak untuk digunakan dalam konteks pendidikan, khususnya untuk memperkuat hak dan tanggung jawab digital siswa di SMA Negeri kota Padang.

6.2. Implikasi

Adapun implikasi dari kajian disertasi ini sebagai berikut.

1. Implikasi teoritis. Model *value clarification technique of law* (VCTL) pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA berguna untuk mengembangkan teori pembelajaran nilai khususnya pada materi element Pancasila. Dengan model ini diharapkan siswa mampu menginternalkan dalam jiwa nilai-nilai Pancasila (Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Keraknyatan dan nilai keadilan) di era global. Dengan model VCTL ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang hak dan tanggung jawab digital sebagai warga negara.
2. Implikasi praktis. Model *value clarification technique of law* (VCTL) pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA sebagai salah satu alternatif model yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran nilai, hukum dan kewarganegaraan yang membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Model ini juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan siswa berfikir kritis, analitis dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi isu-isu hukum dan kewarganegaraan.

6.3. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari kajian disertasi ini adalah:

1. Bagi Pengambil Keputusan
 - a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemerintah Daerah dianjurkan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan materi hak dan tanggung jawab digital ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), baik secara kontekstual maupun tematik, sesuai dengan kondisi lokal dan nasional.
 - b. Dinas Pendidikan Kota Padang disarankan mengadopsi dan merekomendasikan penggunaan model *Value Clarification Technique of Law*

(VCTL) secara luas dalam pembelajaran PPKn, karena terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman nilai, hukum dan moral digital siswa.

c. Pemerintah daerah dan sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan sistematis bagi guru PPKn terkait literasi digital, pemahaman hak & tanggung jawab digital warga negara dan strategi implementasi model VCTL dalam pembelajaran kontekstual berbasis isu digital.

2. Bagi Pengguna.

a. Bagi Guru: Guru PPKn disarankan untuk mengimplementasikan model VCTL dalam pembelajaran sebagai pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan etika digital secara lebih mendalam dan reflektif.. Guru juga perlu mengaitkan isu-isu aktual digital (seperti hoaks, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian) dengan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila agar siswa lebih kontekstual dalam memahami hak dan tanggung jawab digital. Guru didorong untuk meningkatkan literasi digital pribadi dan mengembangkan media pembelajaran berbasis digital yang interaktif dan bernilai edukatif.

b. Bagi Siswa: Siswa diharapkan aktif dalam proses klarifikasi nilai, mampu menyampaikan pendapat dengan kritis, serta berani memilih nilai, dan moral yang benar dalam konteks digital. Siswa juga perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi, menjaga etika berkomunikasi di ruang digital, serta menghargai hak digital orang lain. Sebagai warga negara digital, siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam komunitas online, tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga agen perubahan yang positif.

c. Sekolah disarankan untuk mendukung penerapan model VCTL melalui kebijakan internal yang memberi ruang bagi pembelajaran berbasis nilai, khususnya dalam pelajaran PPKn. Sekolah perlu menyediakan fasilitas dan lingkungan digital yang aman, serta mendukung pembiasaan penggunaan media digital yang sehat dan produktif bagi siswa. Sekolah juga diharapkan menjalin kemitraan dengan orang tua dan komunitas untuk membangun budaya digital yang etis, inklusif, dan berkarakter.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Melakukan pengembangan model di jenjang pendidikan yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model *Value Clarification Technique of Law (VCTL)* pada jenjang pendidikan yang berbeda, seperti tingkat SMP, perguruan tinggi, atau pendidikan nonformal, guna mengetahui keberlanjutan dan relevansi model pada berbagai tingkat usia dan kemampuan berpikir peserta didik.
- b. Mengintegrasikan aspek teknologi secara lebih mendalam. Peneliti di masa depan dapat mengembangkan model VCTL dengan integrasi teknologi pendidikan digital, misalnya melalui platform pembelajaran daring atau media interaktif berbasis hukum digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses klarifikasi nilai.
- c. Melakukan uji coba di wilayah yang lebih Luas. Penelitian ini masih terbatas pada konteks kota Padang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah ke berbagai kota atau provinsi di Indonesia guna memperoleh generalisasi hasil dan mengidentifikasi perbedaan kontekstual dalam penguatan karakter digital siswa.

Dalil- dalil dalam Penelitian ini

1. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membentuk pemahaman tentang hak dan tanggung jawab, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan digital.
2. Model *Value Clarification Technique of Law* membantu siswa menginternalisasi nilai dengan mengeksplorasi, mengklarifikasi, dan mengimplementasikannya secara sadar.
3. Literasi digital harus meliputi pemahaman atas aspek hukum, etika, dan sosial dalam penggunaan teknologi.
4. Model yang mengaitkan materi hukum dengan pengalaman nyata siswa di dunia digital akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi.
5. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*) efektif dalam membentuk sikap hukum siswa sejak dini, terutama dalam konteks dunia maya yang kompleks.

